

# PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ASAHAN (2005-2018)

## INFLUENCE OF INVESTMENT, MANPOWER, REGION ORIGINAL INCOME (PAD), GENERAL ALLOCATION FUND (DAU), AND SPECIFIC ALLOCATION FUND (DAK) TO THE GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (PDRB) ASAHAN DISTRICT (2005-2018)

Ade Lestari<sup>1</sup>, Ideka Kertawidana<sup>2</sup>, Bambang Wahyudi<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN  
([adelestari28@gmail.com](mailto:adelestari28@gmail.com))

**Abstrak** - Pertumbuhan Ekonomi adalah tolak ukur yang digunakan untuk melihat kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat yang akan menciptakan suatu kondisi keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2018 sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat untuk mencapai keamanan nasional yang menjadi salah satu tujuan dari ekonomi pertahanan dalam mencapai ketahanan ekonomi. Dengan menggunakan variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Konstan, sedangkan variabel independen adalah Investasi, Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif regresi linier berganda dengan data sekunder tahun 2005-2018 diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Model regresi yang diperoleh di uji menggunakan Uji Asumsi Klasik, Uji Statistik dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian juga didukung dengan data primer yaitu wawancara langsung dengan narasumber pada instansi terkait dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah persamaan  $PDRB = -0,094 + 0,264 I + 0,293 TK + 0,564 PAD + 0,225 DAU - 0,258 DAK$  menunjukkan bahwa secara parsial variabel Investasi, Tenaga Kerja dan PAD berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan, sedangkan variabel lain berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan variabel Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan dan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 91,2% sedang sisanya sebesar 8,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci** : Investasi, Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

**Abstract**-Economic Growth is a benchmark used to see the prosperity and prosperity of an area. Increasing the rate of economic growth will be able to increase the prosperity of the people who will create a condition of national security. This study aims to determine the effect of Investment, Labor, Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) on

---

<sup>1</sup> Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Asahan Regency, North Sumatra Province in 2005-2018 as one of the one indicator in assessing the level of public welfare to achieve national security which is one of the objectives of the defense economy in achieving economic security. By using the dependent variable namely Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Constant Prices, while the independent variables are Investment, Labor, Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK). This research uses quantitative methods of multiple linear regression with secondary data from 2005-2018 obtained from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Regression models obtained were tested using the Classical Assumption Test, Statistical Tests and the Coefficient of Determination. The results of the study were also supported by primary data, namely direct interviews with speakers at related instances and documentation. The results obtained are the GDP equation =  $-0.094 + 0.264 I + 0.293 TK + 0.564 PAD + 0.225 DAU - 0.258 DAK$  shows that partially the Investment, Labor and PAD variables have a significant and positive effect on Asahan Regency's GRDP, while other variables influence not significant to the Asahan Regency GRDP. The results also showed that simultaneously Investment, Labor, PAD, DAU and DAK variables had a significant effect on Asahan Regency's GRDP and the independent variables could explain the dependent variable by 91.2% while the remaining 8.8% was explained by other factors not included in this study.

**Keywords:** Investment, Labor, Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK)

## Pendahuluan

Terbentuknya negara memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sama halnya dengan ilmu pertahanan yang menitikberatkan pada tujuan yang diharapkan yaitu berdaulatnya sebuah negara dan terciptanya kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Untuk sampai pada titik tersebut salah satu unsur negara yaitu pemerintah melaksanakan pembangunan baik dalam skala nasional maupun regional untuk mendapatkan pemerataan pembangunan. Pembangunan secara luas dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas sumber daya

potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, manusia, capital atau modal maupun sumber daya lain dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu kajian dalam Ilmu Pertahanan adalah bidang ekonomi yakni Ilmu Ekonomi Pertahanan dimana salah satu fokus dari Ilmu Ekonomi Pertahanan adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk pertahanan dalam ekonomi makro. Makro ekonomi tersebut juga merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menangani tentang ekonomi secara agregat seperti tingkat dan laju pertumbuhan output nasional,

---

<sup>4</sup> Iman Taufik. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kota Tebing Tinggi. Tesis Magister (Perencanaan Wilayah dan Perdesaan) Universitas Sumatera Utara.

tingkat suku bunga, pengangguran dan inflasi. Untuk mengkaji perekonomian suatu negara indikator penting yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, ekspor-impor dan investasi. Perhitungan total aktivitas ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang berbeda antara lain, Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), dan Pendapatan Nasional Bersih atau Net National Income (NNI).<sup>5</sup> PDB mengukur total kegiatan ekonomi produksi barang dan jasa dalam suatu negara pada periode tertentu serta menghitung total produksi dari suatu negara dengan memakai faktor produksi yang berada di dalam negeri dimana PDB lebih mencerminkan kegiatan ekonomi suatu negara dibandingkan dengan PNB yang memperhitungkan keberadaan faktor produksi yang digunakan. Peningkatan PDB mencerminkan peningkatan nilai tambah atau balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam berbagai faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi juga oleh peningkatan ekonomi wilayah. Pada lingkup wilayah peningkatan produksi

secara makro dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, keberhasilan pembangunan dapat menciptakan peningkatan perekonomian sebagai pemicu perubahan dan pembaruan kehidupan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dalam tingkat nasional dan juga daerah dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola daerahnya sendiri dalam bentuk otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi daerah tersebut adalah kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam lingkup wilayah untuk memperkuat basis ekonomi. Otonomi daerah tersebut diberikan kepada tingkat provinsi dan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Asahan.

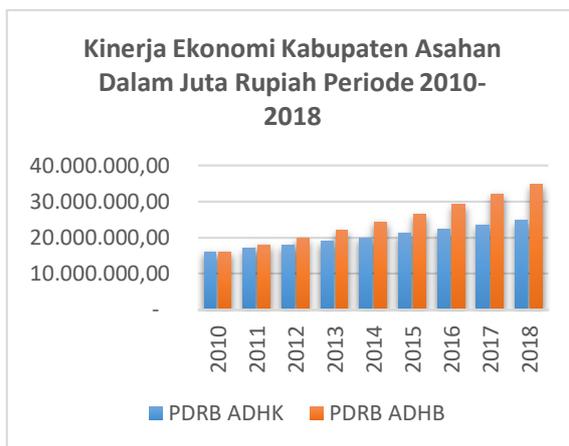
Kabupaten Asahan adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi alam tinggi baik dari sektor perkebunan, pertanian dan beberapa wisata alam maupun buatan. Kabupaten Asahan diyakini akan

---

<sup>5</sup> Purnomo Yusgiantoro. (2014). Ekonomi Pertahanan. PT. Gramedia, Jakarta

berkembang dan merupakan kabupaten yang berperan penting terutama di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan Kabupaten Asahan yang terus meningkat dalam 9 tahun terakhir yakni tahun 2010-2018 terutama dari kinerja ekonominya dapat dilihat pada Gambar 1 :

Pada Gambar 1, menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Asahan terus mengalami peningkatan.



**Gambar 1.** Kinerja Perekonomian Kabupaten Asahan Tahun 2010-2018 (Juta Rupiah)  
 Sumber : BPS Kabupaten Asahan 2019 (diolah)

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp 16.076.728,90 juta mengalami peningkatan hingga mencapai angka Rp24.844.068,11 juta pada tahun 2018. Begitu juga dengan PDRB atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2010 sebesar Rp 16.076.728,90 juta mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 34.666.912,65 juta padatahun 2018.

Pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari peran tiga pilar utama yakni

pemerintah, swasta dalam hal ini sektor industri/bisnis serta masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai regulator dan fasilitator. Swasta atau sektor industri/bisnis berperan dalam menjalankan kegiatan industri atau dapat juga sebagai investor dan masyarakat adalah peranan paling penting sebagai objek dan subjek pembangunan. Agar berjalan dengan baik dan terarah peran tiga pilar tersebut sangat diperlukan agar tujuan kesejahteraan tercapai. Kabupaten Asahan juga tidak terlepas dari pemanfaatan tiga pilar tersebut.

Diperlukan kemampuan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan pengelolaan daerah. Tolak ukur kemampuan pemerintah dalam mengelola daerahnya adalah dengan melihat nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, kemampuan membangun daerahnya dianggap semakin tinggi pula hal ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia (Indonesia, 1999), dilengkapi pula dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Indonesia, 2000) dan saat ini telah disempurnakan dengan Undang

Undang Nomor 32 (Indonesia, 2004a) dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 (2004b) untuk mengkaji peraturan penerimaan pemerintah daerah. Pembangunan daerah juga tidak terlepas pula dari peran Pemerintah Pusat untuk membantu menyokong kebutuhan suatu daerah/wilayah. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari penerapan sistem pemerintahan Negara Kesatuan.

Peran Pemerintah Pusat dalam membantu Pemerintah Daerah untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pemberian Dana Alokasi Umum dan Khusus kepada daerah yang bersumber dari APBN. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk melaksanakan program kebijakan dalam rangka pembangunan daerah pemerintah

harus mengeluarkan biaya sebagai indikator besarnya dan banyaknya kegiatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah setiap tahun yang tertera dalam APBN dalam lingkup nasional dan APBD dalam lingkup regional yang biasa disebut kebijakan fiskal. Tujuan dari pada kebijakan fiskal dalam hal ini pengeluaran pemerintah adalah untuk kestabilan harga tingkat output dan kesempatan kerja serta memacu pertumbuhan ekonomi.(Sitaniapessi, 2013). Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah juga bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi agar keseimbangan perekonomian tercipta. Oleh karena itu dapat dikatakan pengeluaran pemerintah dan inflasi merupakan variabel dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Investasi merupakan penambahan barang modal riil pada stok barang yang sudah ada.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan investasi merupakan pembelian barang modal dan jasa menyangkut tentang keseluruhan

---

<sup>6</sup> Purnomo Yusgiantoro. (2010). Perekonomian Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

pengeluaran untuk menambah barang modal yang sudah ada, maupun mengganti barang modal yang sudah tidak layak. Investasi dianggap menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah investasi dengan harapan terciptanya iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Masyarakat sebagai objek dan subjek dalam pembangunan ekonomi dapat melaksanakan perannya sebagai sumber daya manusia atau tenaga kerja pada proses produksi. Pendapat lain mengenai Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan pada umumnya memiliki jangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, dengan catatan jika ada permintaan terhadap

tenaga kerja dan jika mau berpartisipasi.<sup>8</sup> Penggalan pendapatan daerah, peningkatan peran swasta dalam kontribusinya pada investasi di sektor industri, serta peningkatan partisipasi tenaga kerja diharapkan sebagai modal pembangunan daerah dari bawah ke atas (*bottom up*) dan perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) yaitu pengelolaan dana alokasi umum dan khusus agar saling berkesinambungan guna tercapainya pembangunan daerah serta membantu peningkatan ekonomi wilayah.

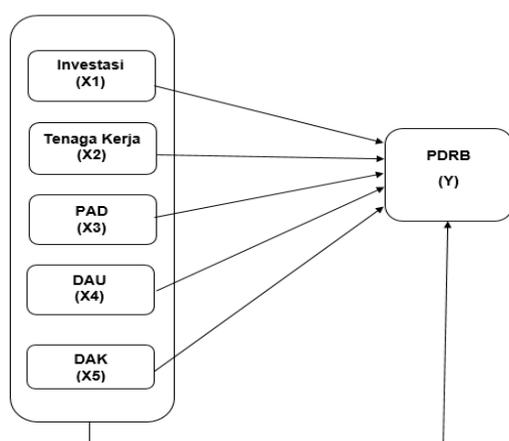
Beberapa variabel lain yang diharapkan mempengaruhi kinerja ekonomi suatu daerah adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Investasi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan maka, berdampak baik pada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi yang diharapkan guna menciptakan keamanan nasional. Keamanan nasional berorientasi pada aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang mendorong dalam sektor pertahanan. Cakupan keamanan nasional tersirat dalam kalimat “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh

---

<sup>7</sup> Sunariyah. (2003). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta : UPPAMP YKPN.

<sup>8</sup> Ibid

tumpah darah Indonesia, maka seluruh tumpah Indonesia mencakup; 1) perlindungan terhadap warga negara yang dimaknai dengan hak asasi manusia, 2) perlindungan terhadap masyarakat dan 3) perlindungan terhadap negara, konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia.<sup>9</sup>



**Gambar 2.** Model Penelitian  
 Sumber : Hasil olahan peneliti (2019)

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mencari tahu kendala apa yang menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan yang melambat dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan. Maka penelitian ini mengacu pembahasan berjudul pengaruh investasi, tenaga kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Asahan Sumatera Utara (2005-2018).

Ekonomi pertahanan adalah kajian ilmu mengenai ilmu ekonomi yang dipadukan dengan ilmu pertahanan dengan mengkaitkan kondisi suatu negara dalam menganalisis masalah - masalah ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan dan kedaulatan negara.

Cara pandang ilmu ekonomi pertahanan yang menggabungkan ilmu ekonomi dan ilmu pertahanan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kebutuhan peningkatan anggaran pertahanan sebagai masalah ekonomi;
2. Kebutuhan peningkatan anggaran pertahanan sebagai masalah keamanan; dan
3. Ekonomi pertahanan mengelompokkan permasalahan ekonomi pertahanan menjadi 4 tema yaitu manajemen pertahanan, sumber daya pertahanan, efek pertahanan, dan kebutuhan sumber daya ekonomi.

<sup>9</sup> Bambang Darmono. (2010). "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia". Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 15 No.1

Untuk mewujudkan kepentingan nasional sektor pertahanan negara, kehadiran ekonomi pertahanan berada pada peran strategis, yang sasaran utamanya adalah bagaimana pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkembang melalui teknologi sebagai sumber daya pertahanan yang dimanfaatkan secara wajar, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dengan prinsip perencanaan secara totalitas (komprehensif) terpadu, terarah dan berlanjut untuk kepentingan pertahanan agar mampu menciptakan kemakmuran kehidupan social ekonomi rakyat dan keamanan nasional.<sup>10</sup> Ekonomi pertahanan memiliki orientasi kebijakan yang kuat, analisis sering dilakukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan mengenai belanja pertahanan pemerintah. Kehadiran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah paradigma ekonomi pertahanan, terutama dalam membangun pertahanan nirmiliter sehingga dituntut dapat menggunakan metode-metode dalam ekonomi pertahanan untuk mewujudkan

efektivitas dan efisiensi kekuatan pertahanannya. Dalam perkembangan ekonomi, suatu negara mempunyai banyak aktor yang sangat signifikan yang memengaruhi pembangunan kekuatan pertahanannya. Ruang lingkup ekonomi pertahanan demikian luas, mencakup faktor-faktor internal dan eksternal yang mencakup regional serta global. Tingkat ekonomi pembangunan suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan kekuatan. Secara umum, ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perekonomian di negara berkembang disebut ekonomi pembangunan (development economy). Seperti halnya kekhususan ekonomi pembangunan sebagai ekonomi untuk negara berkembang, secara khusus ekonomi pertahanan di negara berkembang mempunyai karakteristik tersendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil sintesa bahwa ilmu pertahanan adalah cakupan dari beberapa disiplin ilmu salah satu adalah ilmu ekonomi yang di padukan dengan ilmu pertahanan yang mengkaji tentang permasalahan ekonomi dengan tujuan pertahanan negara yaitu kedaulatan dan

---

<sup>10</sup>Supandi. (2009). Text Book Ekonomi Pertahanan. Jakarta Makmur Cahaya Ilmu, Jakarta.

keamanan nasional serta mengenai permasalahan pertahanan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran ekonomi masyarakat dengan cakupan makro dan mikro ekonomi yang salah satu fokusnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan wilayah.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan tingkat kemakmuran rakyatnya semakin tinggi.<sup>11</sup> Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan PDB sebagai salah satu indikatornya selain dari pendapatan riil perkapita, kesejahteraan penduduk, dan tingkat penyerapan kerja dan pengangguran.<sup>12</sup> PDB adalah Produk Domestik Bruto dalam skala nasional, sedangkan dalam skala regional disebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Pada tahun 2010 dilakukan perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha menjadi 17 sektor, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Pengolahan
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas

5. Pengadaan Air
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi dari pada laju pertumbuhan penduduk, semakin cepat juga perkembangan volume *stok capital* rata-rata per tenaga kerja. Semakin tinggi *rasio capital* per tenaga kerja

---

<sup>11</sup> Supandi. (2014). Text Book Ekonomi Pertahanan. Jakarta Makmur Cahaya Ilmu, Jakarta.

<sup>12</sup> Ibid

kecenderungan kapasitas produksi per tenaga kerja juga semakin tinggi. Teori *Harrod – Domar*. Teori ini merupakan gabungan dari kaum klasik dan *Keynes* dan mempertahankan pendapat dari ahli ekonomi sebelumnya yang menekankan pada pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori ini memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa serta akan menambah permintaan efektif masyarakat. Lalu pada satu masa tertentu perekonomian pada masa tersebut setelah dilakukannya pembentukan modal akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar,<sup>13</sup>

Teori *Sollow Swan*, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja.<sup>14</sup> Teori Klasik *Adam Smith* beranggapan bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Hal ini dengan anggaoan bahwa alam (tanah) tidak ada artinya jika tidak ada manusia

yang mampu mengolahnya. Teori ini juga mengaggap bahwa sumber daya manusia efektif adalah awal dari pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Salah satu bentuk pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah selain dari Dana Perimbangan dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tetang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 3 menjelaskan definisi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari retribusi daerah tersebut, hasil pajak, pendapatan laba

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno. (2007). Makro ekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>14</sup> Lincolin Arsyad. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

perusahaan daerah tersebut dan pendapatan lain-lain yang sah<sup>15</sup>

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia pengertian dari Dana Alokasi Umum adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah bersumber dari dana APBN, dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *Block Grant* yang artinya adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Dana Alokasi Umum tersebut diserahkan langsung ke daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dasar Hukum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen dari Pendaptan Dana Daerah pada Dana Perimbangan. Untuk menghitung alokasi

DAU, beberapa tahapan yang dilalui yaitu, Tahapan Akademis, Tahapan Administratif, Tahapan Teknis. Rumus Formula DAU:

**DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)**

Dimana :

AD : Gaji PNS Daerah

CF : Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal<sup>16</sup>

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kriteria pengalokasian DAK, adalah :

1. Kriteria Umum, kriteria ini dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Kriteria khusus, kriteria ini dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Patric Rarung. (2016). "Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 Nomor 03 Tahun

<sup>16</sup> Dana Alokasi Umum. Diakses pada <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>

undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

3. Kriteria teknis, kriteria ini disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Ada 17 bidang arah kegiatan Dana

Alokasi Khusus, yaitu:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
3. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
4. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
5. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan
7. Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan
8. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman
9. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
10. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
11. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

12. Dana Alokasi Umum Bidang Infrastruktur Jalan

13. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi

14. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum

15. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi

16. Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Desa

17. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan asosiatif kausalitas. Penggunaan desain penelitian kausal untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel yang digunakan. Kausalitas pada umumnya menggunakan teknik eksperimen dengan mengendalikan variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen berdasarkan situasi yang telah direncanakan dalam hal ini 14 tahun dari tahun 2005-2018. Populasi pada penelitian ini adalah data PDRB di Kabupaten Asahan. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah data PDRB Kabupaten Asahan dari tahun 2005-2018.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan analisis adalah data PDRB Kabupaten Asahan Sumatera Utara, investasi, tenaga kerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data tersebut merupakan sekunder runtun waktu tahunan dari periode 2005 sampai dengan 2018. Data sekunder didapat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Data primer untuk memperkuat hasil penelitian diperoleh dengan wawancara langsung dengan instansi terkait yaitu BPPM (Badan Pengelola Perizinan dan Modal), Disnaker Kabupaten Asahan, Bappenda Kabupaten Asahan dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Asahan).

Alat yang digunakan untuk mengolah data adalah SPSS versi 24.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan menggunakan analisis kuantitatif regresi linier berganda. Model regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = PDRB Kabupaten Asahan
- X1 = Jumlah Investasi
- X2 = Tenaga Kerja
- X3 = Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X4 = Jumlah Dana Alokasi Umum
- X5 = Jumlah Dana Alokasi Khusus
- a = Konstanta
- b1 – b5= Koefisien regresi
- e = eror term

### **Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi (tidak terkontrol). Hipotesis dapat diuji dengan beberapa pengujian untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh masing-masing variabel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data berganda *time series*.

### **Uji Parsial (t-test)**

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan untuk mengetahui apakah model regresi variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) secara parsial mempengaruhi variabel terikat ( $Y$ ). Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>17</sup> Nilai yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah nilai t hitung. Hasil perhitungan uji t dibandingkan dengan nilai ttabel pada  $\alpha = 0,05$ . Apabila t hitung  $>$  t tabel, maka koefisien regresi dinyatakan signifikan

### **Uji Simultan (F-test)**

Uji seluruh koefisien regresi secara serempak sering disebut dengan uji model. Uji F dimaksudkan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai yang digunakan untuk melakukan uji serempak atau simultan adalah nilai F-hitung. Uji F yang signifikan menunjukkan bahwavariasi variabel terikat dijelaskan sekian persen oleh variabel bebas secara bersama-sama adalah benar-benar nyata

dan bukan terjadi karena kebetulan. Dengan kata lain, beberapa persen variabel terikat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas secara bersama-sama, dijawab oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ), sedangkan signifikan atau tidak yang sekian persen itu, dijawab oleh uji F.<sup>18</sup>

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sering pula disebut dengan koefisien determinasi majemuk (multiple coefficient of determination).  $R^2$  menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat ( $Y$ ) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel) secara bersama-sama.  $R$  adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat ( $Y$ ) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Dalam tabel ANOVA, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan untuk analisis adalah nilai ( $R^2$ ) yang telah disesuaikan ( $R^2_{adjusted}$ ).

### **Uji Penyimpangan Klasik**

#### *Uji Normalitas*

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen,

---

<sup>17</sup> Anwar Sanusi. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

<sup>18</sup> Ibid

keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak, maka pengujian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 22. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan penyebaran data (titik) pada Normal Plot of Regression Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### *Uji Heteroskedastisitas*

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas ( $Y_i$ ) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas ( $X_i$ ), maka varian dari  $Y_i$  adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul

dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan uji korelasi Spearman, dimana jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### *Multikolinieritas*

Pengujian ini berguna untuk mengidentifikasi apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya.<sup>19</sup> Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation faktor (VIF). Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya Universitas Sumatera Utara multikolinieritas adalah nilai *tolerance* > 0,1 atau VIF < 10. Model regresi linier berganda harus terbebas dari gejala multikolinieritas agar dapat digunakan dalam penelitian.

#### *Uji Autokorelasi*

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu

---

<sup>19</sup> Imam Ghozali. (2005). Aplikasi Analisis Multifariat dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

(seperti dalam data time series) atau ruang (seperti dalam data cross section). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Durbin-Watson (DW test) dimana apabila nilai DW hitung berada diantara  $d_l$  (batas bawah) dan  $4-d_u$  (batas atas), maka model regresi terbebas dari autokorelasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Kabupaten Asahan**

Sejarah Kabupaten Asahan berawal dari perjalanan Kesultanan dari Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 ke Johor dan Malaka. Asahan yang menjadi cikal dari nama daerah ini adalah nama suatu kawasan sekitar hulu sungai yang menjadi tempat beristirahat rombongan Sultan Iskandar Muda pada saat perjalanan. Setelah beristirahat dikawasan yang disebut Asahan, rombongan melanjutkan perjalanan ke sebuah 'Tanjung' yang merupakan

pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Silau dan ditempat itu Sultan Iskandar Muda bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat tersebut juga Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai 'Balai' untuk tempat menghadap yang kemudian tempat tersebut berkembang menjadi sebuah perkampungan. Daerah tersebut berkembang cukup pesat dengan menjadi pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka hingga saat ini dikenal menjadi daerah yang bernama 'Tanjung Balai'.

Abdul Jalil adalah seorang putra dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan salah seorang putri dari Raja dari Raja Simargolang yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan sebagai Sultan Asahan I. Pemerintah Kesultanan Asahan dimulai pada tahun 1630 sejak dilantiknya Sultan Asahan I sampai dengan Sultan Asahan XI. Didaerah Asahan pemerintahan dilaksanakan juga oleh para datuk di wilayah Batu Bara serta beberapa kerajaan kecil lainnya.

Pada tanggal 22 September 1865, Belanda berhasil menguasai kesultanan Asahan, urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Belanda mulai dari Asahan dan Tanjung Balai di Pimpin oleh

seorang Kontroler yang diperkuat dengan Gouvernements Besluit tanggal 30 September 1867 Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dengan tiga pembagian wilayah pemerintahan, yaitu:

1. Onder Afdeling Batu Bara
2. Onder Afdeling Asahan
3. Onder Afdeling Labuhan Batu

Pada tanggal 13 Maret 1942, Jepang berhasil menundukkan Pemerintahan Belanda dengan menggantikannya menjadi pemerintahan Fasisme Jepang yang di pimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan yang digunakan oleh pemerintahan Belanda sebelumnya yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu Bara. Selain itu wilayah yang lebih kecil lagi dibagi dalam Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Distrik Kisaran, Distrik Bandar Pulau, Distrik Pulau Rakyat dan Distrik Sei Kepayang.

Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945, tiga hari sebelum hari kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan dibentuk pada bulan

September 1945. Pada saat itu pemerintahan Fasisme Jepang sudah tidak ada lagi namun, pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada.

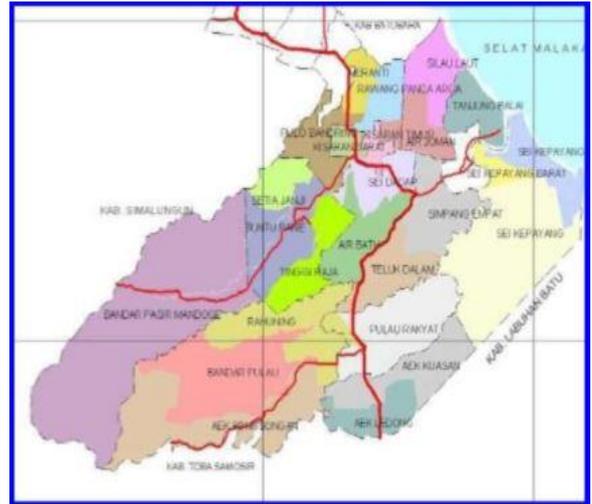
Struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan berlaku pada tanggal 15 Maret 1946 dan pada tanggal tersebut diperingati hari jadi Kabupaten Asahan. Wilayah Asahan dipimpin oleh Abdullah Eteng sebagai kepala wilayah dan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah. Pada saat itu wilayah Asahan dibagi atas lima kewedanan, yaitu:

1. Kewedanan Tanjung Balai
2. Kewedanan Kisaran
3. Kewedanan Batu Bara Utara
4. Kewedanan Batu Bara Selatan
5. Kewedanan Bandar Pulau

Pada Konferensi Pamong Praja se-Kresidenan Sumatera Timur pada bulan Juni 1946 diadakan penyempurnaan struktur pemerintahan:

1. Sebutan wilayah Asahan diganti menjadi Kabupaten Asahan
2. Sebutan Kepala Wilayah diganti menjadi Bupati
3. Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti menjadi Patih
4. Wilayah Asahan dibagi menjadi 15 (lima belas) Wilayah Kecamatan pada saat itu, yaitu terdiri dari:

5. Kewedanaan Tanjung Balai dibagi menjadi empat kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Tanjung Balai
  - b. Kecamatan Air Joman
  - c. Kecamatan Simpang Empat
  - d. Kecamatan Sei Kepayang
6. Kewedanaan Kisaran dibagi atas tiga kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Kisaran
  - b. Kecamatan Air Batu
  - c. Kecamatan Buntu Pane
7. Kewedanaan Batu Bara Utara terdiri dari dua kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Medang Deras
  - b. Kecamatan Air Putih
8. Kewedanaan Batu Bara Selatan terdiri dari tiga kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Talawi
  - b. Kecamatan Tanjung Tiram
  - c. Kecamatan Lima Puluh
9. Kewedanaan Bandar Pulau terdiri dari tiga kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Bandar Pulau
  - b. Kecamatan Pulau Rakyat
  - c. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge



**Gambar 3.** Gambar Wilayah Kabupaten Asahan

Sumber : RPJMD Kab Asahan 2016-2021

Berdasarkan keputusan DPRD-GR Tk II Asahan No.3/DPR-GR/1963 tanggal 16 Februari 1963 diusulkan ibukota Kabupaten Asahan dipindahkan dari Kotamadya Tanjung Balai ke Kota Kisaran dengan alasan agar Kotamadya Tanjung Balai dapat lebih mudah mengembangkan daerahnya serta letak Kota Kisaran dirasa lebih strategis untuk wilayah Asahan. Ketentuan tersebut baru terealisasi pada tanggal 20 Mei 1968 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1980, Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 28, Tambahan Negara Nomor 3166. Lalu pada tahun 1982, Kota Kisaran ditetapkan menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 62 Tahun 1982.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu dari 33 provinsi di Provinsi

Sumatera Utara yang berada di Kawasan Pantai Timur. Ibukota Kabupaten Asahan adalah Kisaran. Secara geografis Kabupaten Asahan terletak pada posisi 02003' – 03026' Lintang Utara dan 99001' – 10000' Bujur Timur dan memiliki jarak sekitar 189,6km dari Kota Medan Sumatera Utara. Hampir seluruh daerahnya adalah kawasan pesisir karena memiliki topografi yang sebagian besar berupa dataran rendah antara 0 – 1.000mdpl.

Pemerataan pembangunan daerah ini masih kurang merata yang dimana masih bertumpu di sekitaran daerah Kisaran yang menjadi Ibukota Kabupaten dari Asahan. Terlihat dari banyaknya usaha kuliner, retail dan fashion yang mulai bertebaran disepanjang jalanan induk di Kota Kisaran belakangan ini, bertolak belakang dengan kawasan lainnya. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan perlu dipacu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain menumbuhkan geliat berwirausaha masyarakatnya dengan ekonomi kreatif, perbaikan infrastruktur jalan, mengembangkan pusat pelayanan jasa peningkatan kualitas pendidikan dan sosial budaya dan kegiatan lainnya yang didukung dengan

pengaturan/perencanaan tata ruang kota dan dinas terkait.

Pada bulan Desember 2017 terdaftar jumlah wilayah administratif Kabupaten Asahan terdiri dari 25 kecamatan, 177 desa dan 27 kelurahan yang terdiri dari 2 desa swadaya, 2 desa swakarya serta 200 desa/kelurahan swasembada yang telah definitif.

### **Investasi Kabupaten Asahan**

Kabupaten Asahan memiliki investasi di beberapa sektor seperti salah satu yang paling menonjol adalah pertanian dan perkebunan, investasi ini mampu membantu peningkatan pertumbuhan pekenomian di wilayah Kabupaten Asahan dikarenakan luas lahan yang dapat dipergunakan cukup banyak dan pengelolaan oleh perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemda Asahan dengan mengikuti aturan CSR (Corporate Social Responsibility). BPPM atau Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal sebagai instansi pemerintah yang menangani permasalahan berkaitan dengan investasi di Kabupaten Asahan mampu membuka pintu bagi para investor untuk mempermudah inverstor menanamkan modalnya terlihat dari pengahargaan yang didapatkan oleh Kabupaten Asahan

sebagai Inovator Ke-II untuk Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Pengembangan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (SICANTIK) Cloud 2019 pada tanggal 4 November diwakilkan oleh wakil Bupati Asahan Bapak. H. Surya B.Sc, dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal untuk membantu meningkatkan perekonomian Kabupaten Asahan dalam kaitannya dengan investasi, BPPM mengupayakan untuk meningkatkan

Investasi di Kabupaten Asahan dengan beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Memanfaatkan penggunaan teknologi masa kini yaitu penggunaan tanda tangan elektronik dengan tujuan mempercepat proses perizinan, memudahkan dan transparansi
2. Penerbitan izin berbasis website yaitu penggunaan OSS dan SICANTIK CLOUD
3. Nominal biaya tercantum dalam sertifikat izin
4. Sosialisasi rutin terhadap para pelaku usaha

5. Monitoring PMA dan PMDN
6. Rencana pembangunan MAL PELAYANAN PUBLIK pada T.A 2020

Kabupaten Asahan memiliki beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan agar lebih menarik para investor menanamkan modalnya guna menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan. Beberapa sektor tersebut antara lain:

1. Sektor Pertanian dan Perkebunan
2. Sektor Peternakan
3. Sektor Perikanan
4. Sektor Pariwisata
5. Sektor Perdagangan
6. Potensi Sektor Lainnya (Biomassa, Ketenaga Listrik dan Bahan Tambang)

Menurut BPPM, Kabupaten Asahan memiliki iklim investasi yang sangat baik untuk menanamkan modal dan menjalankan bisnis oleh karena itu Kabupaten Asahan tidak hanya memiliki investor dalam negeri namun juga investor asing. Berikut daftar PMA (Penanaman Modal Asing):

**Tabel 1.** Daftar PMA Kabupaten Asahan

No.	PERUSAHAAN	USAHA	KETERANGAN
1.	PT. Harvard Cocopro	Pengelola tepung santan kelapa	PMA/Malaysia

2.	PT. Socfindo	Perkebunan Sawit dan Pengolahannya	PMA/Belgi
3.	PT. Sintong Abadi	Industri Makanan Hewan dan Lemak Nabati, Hewani dan Minyak Kelapa Sawit	PMA/Malaysia
4.	PT. Bridgestones	Perkebunan Karet dan Industri Rubber	PMA/USA
5.	PT. Agrindo Indah Persada	Pengelola Kelapa Sawit	PMA/Inggris
6.	PT. Sinar Piasa Energi Indonesia	Pembangkit Tenaga Listrik	PMA/Tiongkok
7.	PT. Green Life Organic Fertilizer	Industri Pupuk Kompos Sampah Organik	PMA/Malaysia
8.	PT. Sri Makmur Abadi	Industri Produk Masak Kelapa	PMA/Malaysia
9.	PT. Gigan Daya Semesta	Pembangkit Tenaga Listrik	PMA/Malaysia
10.	PT. ASD Bakrie Oil Palm	Perkebunan Sawit	PMA/USA

Sumber : Profil Potensi Dan Peluang Investasi Daerah Kabupaten Asahan 2019

Pada tabel selanjutnya adalah daftar PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Kabupaten Asahan :

**Tabel 2.** Daftar PMDN Kabupaten Asahan

No.	PERUSAHAAN	BIDANG USAHA
1.	PT. Warisan Telma	Perkebunan Karet
2.	PT. Saudara Sejati Luhur	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit
3.	PT. Gunung Melayu	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit, Angkutan Kendaraan Bermotor, Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Air
4.	PT. Bakrie Sumatera Plantation	Latex and Crum, Rubber
5.	PT. Sari Persada Raya	Perkebunan Karet, Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit
6.	PT. Agro Rubberindo Industry	Industri Pengolahan Sawit
7.	PTPN IV PKS Mandoge	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit
8.	PTPN IV PKS Pulau Rakyat	Perkebunan Sawit dan Karet
9.	PTPN IV PKS Sei Silau	Pengolahan Kelapa Sawit
10.	PT. Fairco Bumi Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit
11.	PT. Bakrie Rubber Industri	Industri Barang Karet
12.	PT. Saudara Sejati Luhur	Industri Pengolahan Sawit
13.	PT. PP Londong Sumatera Indonesia Tbk	Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahannya
14.	PT. Karya Energi Mandoge	Pembangkit Listrik Gas dan Air
15.	PT. Varem Sawit Cemerlang	Industri Pengolahan Sawit
16.	PT. Jampalan Baru	Industri Kimia Dasar
17.	PT. Sawit Asahan Tetap Utuh	Industri Makanan
18.	PT. Sri Sumatera Sejahtera	Industri Benang dari Karet
19.	PT. Lippo Limex	Industri Karet
20.	PT. Karya Mitra Andalan	Industri Pengolahan Sawit

21. PT. Mas Mulia
22. PT. Jaya Putra Indonesia
23. PT. Citra Sawit Indah Lestari

Industri Karet  
 Industri Pengolahan Sawit  
 Tanaman dan Perkebunan

Sumber : Profil Potensi Dan Peluang Investasi Daerah Kabupaten Asahan 2019

### Tenaga Kerja Kabupaten Asahan

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi untuk membantu manufaktur dalam menghasilkan barang dan jasa. Tenaga dalam hal ini adalah masyarakat produktif yang berusia diaatas 15 tahun dan telah bekerja. Kebutuhan tenaga kerja pada suatu daerah akan meningkat jika banyaknya jumlah lapangan kerja, dengan begitu pengangguran akan berkurang. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran ekonomi masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan dari Ekonomi Pertahanan, disamping itu jika terjadi peningkatan angka pengangguran akan dapat menjadi sebuah ancaman dalam lingkup kecil disuatu daerah salah satu contohnya adalah kriminalitas yang akan mengganggu keamanan daerah dan pada taraf nasional, berdampak pada keamana nasional.



**Gambar 4.** Diagram Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2005-2018

Sumber: RPJMD Kabupaten Asahan 2005-2018 (diolah)

Terlihat pertumbuhan angka tenaga kerja di Kabupaten Asahan sejak tahun 2005 hingga tahun 2018 fluktuatif dan yang paling signifikan berada di tahun 2009 namun pada periode 2018 menurun kembali. Berdasarkan data di RPJM ditahun 2004, 2005 dan beberapa tahun berikutnya, terjadi peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yaitu hingga 5,93%. Angka tersebut cukup baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Utara 4,72% sedangkan disaat yang sama pertumbuhan ekonomi nasional berada diangka 5%. Kondisi ini berpengaruh terhadap kurangnya pengangguran di Kabupaten Asahan

hingga angka tenaga kerja melonjak tinggi pada tahun 2008.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan terdiri dari 4 poin yaitu :

1. Pajak
  2. Retribusi
  3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Penerimaan Pajak Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappenda jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah terdiri dari 11 jenis yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. PBB Pedesaan dan Perkotaan
10. Pajak Air Tanah
11. Pajak Walet

Penerimaan dari pendapatan tertinggi Asahan adalah dari Pajak sebesar 66,83% pada tahun 2019.

Perolehan Penerimaan Pajak terbesar didapat dari PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 96,22%. Hal ini didukung dengan beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Bappenda dalam rangka meningkatkan Penerimaan PAD asahan yaitu kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak (khusus untuk PBB Pedesaan dan Perkotaan) yaitu dapat dilakukan melalui Indomaret dan Gojek dan jika Wajib Pajak telat membayar akan dikenakan denda sebesar 2%. Pajak Air adalah persentase terendah dari penerimaan Pajakdi Asahan. Menurut sekretaris Bappenda hal ini terjadi karena WP diperkirakan belum melunasi untuk tahun 2019 dikarenakan masih ada waktu yang tersisa hingga tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan Pajak Walet beberapa tahun belakangan sudah tidak ada pungutan hal ini karena pengusaha wallet di Asahan sudah berkurang dan burung wallet sudah tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya akibat dari lingkungan tempat tinggal wallet yang berpindah-pindah.

Bappenda dalam melaksanakan tugas nya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah sudah melaksanakan tanggung jawab seoptimal mungkin namun masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi yang meyebabkan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah masih blm mencapai target yaitu : Wajib Pajak tidak bertempat tinggal disekitaran Asahan mengakibatkan sulitnya dilakukan konfirmasi dan pungutan Pajak. Serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak. Oleh karena itu beberapa kebijakan yang diambil oleh Bappenda untuk memaksimalkan pemungutan pajak adalah dengan memudahkan cara pembayaran Pajak seperti yang telah di jelaskan pada paragraf sebelumnya (melalui indomaret dan gojek) serta dapat juga di lakukan melalui Bank Sumut, Bappenda juga mengadakan kegiatan Gebyar Pajak untuk menciptakan daya tarik WP dalam membayar Pajak dengan program undian dan Bulan Panutan Wajib Pajak Daerah. Bulan Panutan Pajak Daerah mengutamakan golongan Pegawai negeri Sipil (PNS) dengan tujuan agar dapat menjadi panutan dalam kesadaran membayar pajak.

Menghadapi era digitalisasi Bappenda juga memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kemudahan terkait pajak yaitu masyarakat Asahan dapat melihat nominal Pajak pada halaman website resmi Bappenda.

**Penerimaan Retribusi Kabupaten Asahan**  
Berdasarkan pengelolaannya jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi terdiri dari 16 macam, yaitu:

1. Bagian Perlengkapam dan Rumah Tangga Bappenda Kab Asahan
2. Bagian ini mengelola retribusi Sewa Rumah Dinas dan Retribusi Sewa Mess Pemda. Penerimaannya sebesar 66,28% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 137.200.000,-
3. Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas ini mengelola retribusi bidang Sewa Alat-Alat Berat, Retribusi Sewa Lapangan Hocky, Retribusi Sewa Gedung Serbaguna, dan Parkir Khusus Alun-Alun dan Hutan Kota. Penerimaan retribusi yang dikelola oleh dinas ini adalah sebesar 26,01% dari target yang di tetapkan atau sebesar Rp 172.660.000,-
4. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP mengelola retribusi Alat Pemadam Kebakaran dan retribusi Lokasi Khusus Isidentil dengan persentase penerimaan sebesar 8,28% atau sebesar Rp 7.452.000,-

5. Dinas Pertanian mengelola retribusi dari Penjualan Produk Usaha Daerah yang terdiri dari: Penjualan Bibit Buah-Buahan di BPP Sipaku dan Penjualan Benih Padi BPP Serbangan dengan total persentase penerimaan sebesar 30,20% atau sebesar Rp 77.000.000,-
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada Dinas ini mengelola retribusi dari Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pasar ternak dengan jumlah persentase penerimaan pada tahun ini sebesar 50,29% atau senilai Rp 50.290.000,-
7. Dinas Perikanan  
Dinas perikanan mengelola retribusi Penjualan Benih Ikan di BBI Rawang Pasar V Meranti dengan penerimaan sebesar 44,12% dari target yang ditetapkan atau senilai Rp 37.500.000,-
8. Dinas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup hanya mengelola retribusi dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu dengan besaran persentase penerimaan 80,24% dari target yang ditetapkan atau senilai Rp 722.180.000,-
9. Dinas Kesehatan
10. Jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan yaitu Rawat Jalan, Rawat Inap, Penunjang Diagnostik, Administrasi (Kesehatan), dan BPJS/Dana Kapitasi dengan total persentase dari penerimaan sebesar 53,05% dari target yang ditetapkan atau senilai Rp 555.563.856,-
11. Dinas Perhubungan  
Dinas Perhubungan mengelola retribusi dari jenis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu senilai Rp 814.011.000,- atau 58,14% dari target yang telah ditetapkan.
12. Dinas Koperasi dan Perdagangan  
Ada empat jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan yaitu Retribusi Pasar, Retribusi Terra Ulang Timbangan, Retribusi Sewa Gudang dan Retribusi Parkir Khusus Pasar. Persentase penerimaan dari retribusi ini sebesar 64,76% dari target atau senilai Rp 838.040.000,-
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Dinas ini mengelola 2 retribusi yaitu Retribusi Tinja dan Retribusi Susun (Rusunawa) dengan

- persentase penerimaan sebesar 83,25% atau senilai Rp 182.029.000,-
14. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata  
Dinas ini mengelola 4 jenis retribusi yaitu retribusi dari Stadion Mutiara, Retribusi Sewa Kelapa Gading, Retribusi Parkir Khusus Kolam Renang, dan Retribusi Parkir Khusus Stadion Mutiara dengan persentase penerimaan dari retribusi yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah 15,15% dari target yang telah ditetapkan atau senilai Rp 5.000.000,-
15. Dinas Pendidikan  
Dinas Pendidikan mengelola penerimaan retribusi dari Pemakaian Sewa Gedung Dinas Pendidikan yaitu dengan persentase penerimaan sebesar 18,75% dari target yang ditetapkan atau senilai Rp 12.000.000,-
16. Dinas Ketenagakerjaan  
Pada Dinas ketenagakerjaan hanya mengelola satu retribusi saja yaitu dari Perpanjangan IMTA dengan persentase penerimaan sebesar 43,96% atau senilai Rp 153.877.200,-
17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
atau saat ini menjadi BPPM mengelola 4 jenis retribusi yaitu dari Sewa Tanah untuk Reklame, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Trayek Angkutan Daftar Ulang dengan total persentase penerimaan sebesar 65,27% atau senilai Rp 2.065.828.229,50
18. Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
atau saat ini menjadi BPPM mengelola 4 jenis retribusi yaitu dari Sewa Tanah untuk Reklame, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Trayek Angkutan Daftar Ulang dengan total persentase penerimaan sebesar 65,27% atau senilai Rp 2.065.828.229,50
19. Kecamatan  
Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Asahan mengelola retribusi
20. Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Asahan mengelola retribusi IMB Kecamatan dengan persentase penerimaan sebesar 10,50% dari target yang ditetapkan atau senilai Rp 52.510.220,-

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Kabupaten Asahan hanya memiliki dua penerimaan yaitu penerimaan Hasil Laba BUMD PT Bank Sumut dan Penerimaan Hasil Laba BUMD PDAM. Pada Tahun Anggaran 2019, realisasi penerimaan pada poin ini sebesar

63,16% dari target yang ditetapkan atau senilai Rp 5.485.750.356,-

### Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan salah satu nya adalah dari Lain-Lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari :

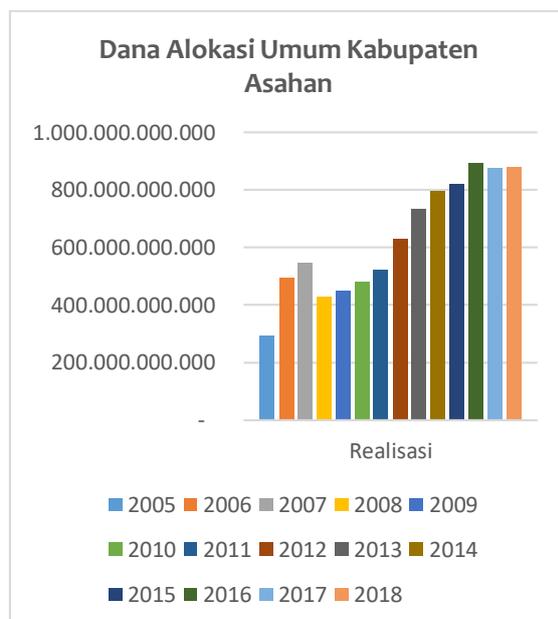
1. Jasa Giro
2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
3. Pendapatan dari Pengembangan Pinjaman kepada BUMD
4. Jasa Penyertaan Modal
5. Penerimaan Lain-Lain:
  - a. Denda Keterlambatan
  - b. Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran
6. Pendapatan Bunga Deposito
7. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD
8. Pendapatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Seluruh post-post tersebut memiliki target yang telah ditetapkan kecuali Pendapatan Bunga Deposito namun yang terealisasi pada tahun Anggaran 2019 hanya jasa giro dengan pesentase penerimaan sebesar 77,01% dari target yang telah di tetapkan yaitu senilai Rp 4.075.901.366,-, Jasa Penyertaan Modal dengan persentase 41,74% dari target yang telah ditetapkan atau senilai Rp

49.304.299,36,-, dan Pendapatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan persentase penerimaan sebesar 5,24% atau senilai Rp 1.119.123.000,-

### Dana Alokasi Umum Kabupaten Asahan

Dana alokasi umum adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan membantu keuangan daerah dengan tujuan otonomi daerah. Jumlah DAU yang diterima Kabupaten Asahan setiap tahunnya cukup fluktuatif namun cenderung meningkat. Penetapan angka DAU untuk Asahan tergantung pada seberapa besar angka Pendapatan Dalam Negeri dan sesuai dengan imbalanced keuangan antara provinsi dan daerah.

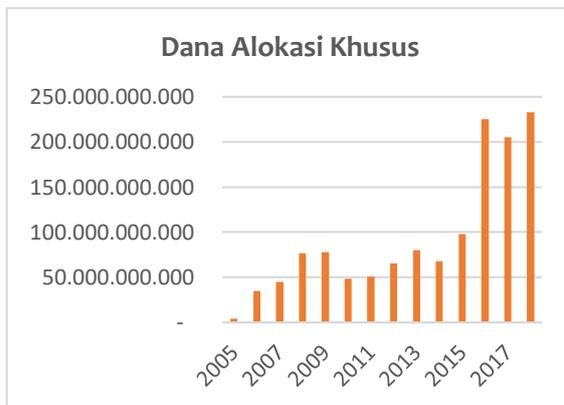


**Gambar 5.** Diagram Grafik Dana Alokasi Umum Tahun 2005-2018

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2005-2018 (diolah)

### Dana Alokasi Khusus Kabupaten Asahan

Jika DAU adalah dana transfer dari pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, DAK adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk membiayai kegiatan khusus daerah baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dana khusus untuk daerah perbatasan dan lainnya yang bertujuan langsung untuk pelayanan masyarakat.



**Gambar 6.** Diagram Grafik Dana Alokasi Khusus Tahun 2005-2018

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2005-2018 (diolah)

Seperti halnya DAU, alokasi DAK Kabupaten Asahan fluktuatif tinggi dan rendah namun cenderung tinggi pada tiga tahun belakang. Angka yang diperoleh untuk alokasi DAK di Asahan tergantung pada skala prioritas nasional serta ditentukan oleh beberapa kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

### Hasil Uji Parsial (t-test)

Pada uji ini  $df = (n-k-1)$ , dimana  $n$  adalah jumlah sample yaitu 14 dan  $k$  adalah jumlah variabel independen yaitu 5. Dasar pengambilan keputusan uji  $t$  pada penelitian ini adalah :

$H_0$  : Variabel Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan

$H_a$  : Variabel Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan

Kriteria pengambilan keputusan terhadap uji  $t$ , adalah:

Jika probabilitas  $< 0,05$ ,  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak

Jika probabilitas  $> 0,05$ ,  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

Jika  $t$  hitung  $< t$  tabel,  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak

Jika  $t$  hitung  $> t$  table,  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

$$t \text{ table} = t (\alpha/2; n-k-1) = t (0,025 ; (14-5-1)) = t (0,025 ; 8) = 2,306$$

**Tabel 3.** Tabel Hasil Uji Parsial

Coefficients <sup>a</sup>		
Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Collinearity Statistics

Model	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.094	.777		-.121	.907	
Ln_X1	.264	.112	.292	2.353	.046	.714
Ln_X2	.293	.097	.450	3.030	.016	.497
Ln_X3	.564	.217	.585	2.594	.032	.216
Ln_X4	.225	.644	.113	.349	.736	.105
Ln_X5	-.258	.140	-.382	-1.835	.104	.254

a. Dependent Variabel: Ln\_Y

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Hasil yang diperoleh dari uji statistic t adalah sebagai berikut:

1. Variabel Investasi (Ln\_X1) :

t hitung (2,353) > t table (2,30600)

Tingkat probabilitas :

$P(0,046) < \alpha(0,05)$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya variabel Investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan

2. Variabel Tenaga Kerja (Ln\_X2) :

t hitung (3,030) > t table (2,30600)

Tingkat probabilitas :

$P(0,016) < \alpha(0,05)$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya variabel Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan

3. Variabel PAD (Ln\_X3) :

t hitung (2,594) > t table (2,30600)

Tingkat probabilitas :

$P(0,032) < \alpha(0,05)$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan

4. Variabel DAU (Ln\_X4) :

t hitung (0,349) < t table (2,30600)

Tingkat probabilitas :

$P(0,736) > \alpha(0,05)$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan

5. Variabel DAK (Ln\_X5) :

t hitung (1,835) < t table (2,30600)

Tingkat probabilitas :

$P(0,104) > \alpha(0,05)$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya variabel DAK tidak

berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan

Persamaan regresi berganda yang didapat berdasarkan Table 4.5 adalah:

$$\text{PDRB} = -0,094 + 0,264 I + 0,293 \text{TK} + 0,564 \text{PAD} + 0,225 \text{DAU} - 0,258 \text{DAK}$$

Model persamaan regresi berganda tersebut memiliki makna:

1. Nilai konstanta sebesar -0,094 menunjukkan nilai intersept yang mencerminkan bahwa jika adanya perubahan pada variabel-variabel dependen, maka proporsi peningkatan PDRB Kabupaten Asahan menurun sebesar 0,094%.
2. Variable Investasi berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan dengan nilai koefisien sebesar 0,264, artinya setiap penambahan 1% variabel PAD akan meningkatkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,264%.
3. Variabel Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan dengan nilai koefisien sebesar 0,293, artinya setiap penambahan 1% orang Tenaga Kerja akan menurunkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,293%.
4. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan dengan nilai koefisien sebesar

0,564, artinya setiap penambahan 1% variabel PAD akan meningkatkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,564%.

5. Variabel DAU berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan dengan nilai koefisien sebesar 0,225, artinya setiap penambahan 1% variable DAU akan meningkatkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,225%.
6. Variabel DAK berpengaruh negatif terhadap PDRB Kabupaten Asahan dengan nilai koefisien sebesar 0,258, artinya setiap penambahan 1% variabel PAD akan menurunkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,258%.

#### Hasil Uji Simultan (F-test)

Uji Simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel terikatnya.

Kriteria pengambilan keputusan terhadap uji t, adalah:

$H_0$  : Variabel Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK secara simultan tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Asahan

$H_a$  : Variabel Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK secara simultan

berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Asahan

Jika probabilitas < 0,05, Ha diterima dan Ho ditolak

Jika probabilitas > 0,05, Ha ditolak dan Ho diterima

Jika F hitung > F tabel, Ha diterima dan Ho ditolak

Jika F hitung < F table, Ha ditolak dan Ho diterima

$$F \text{ tabel} = F(k; n-k)$$

$$F(5; 14-5) = F(5; 9) = F(3,48)$$

**Tabel 4.** Tabel Hasil Uji Simultan

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.393	5	1.079	16.610	.000 <sup>a</sup>
Residual	.520	8	.065		
Total	5.913	13			

a. Dependent Variabel: Ln\_Y

b. Predictors: (Constant), Ln\_X5, Ln\_X1, Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X4

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Hasil yang didapatkan dari Uji Simultan atau R Square adalah nilai F tabel dengan nilai k = 5 dan n = 14 pada tingkat kepercayaan 95% adalah 3,48. Pada tabel tersebut terlihat bahwa persamaan F hitung bernilai 16,610 yaitu lebih besar dari pada nilai F Tabel nya. Dengan tingkat probablitas 0,000.

Dimana  $P = 0,000 < \alpha = 0,05$ . Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel (Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 5.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.955 <sup>a</sup>	.912	.857	.25484	2.263

a. Predictors: (Constant), Ln\_X5, Ln\_X1, Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X4

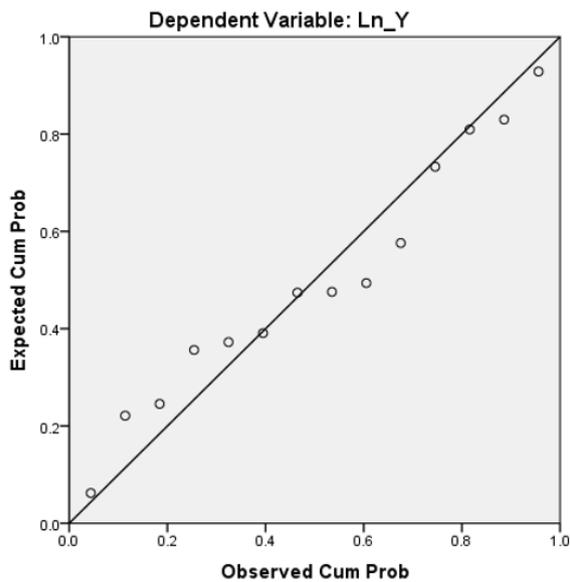
b. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Berdasarkan output yang didapat diketahui bahwa nilai R Square 0,912, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh kelima variabel X (Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK) secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 91,2%.

### Hasil Uji Normalitas

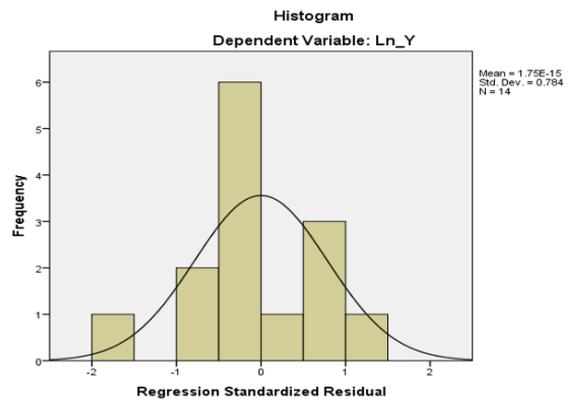
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar 7.** Grafik P Plot

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Pada Gambar 10 terlihat titik-titik atau plot pada grafik menyebar mengikuti dan menyebar pada sekitaran garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.



**Gambar 8.** Grafik Histogram

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Pada Gambar 11 menunjukkan hasil dari olah data menggunakan SPSS versi 24 pada uji asumsi klasik dalam hasil grafik histogram. Pada grafik histogram tersebut terlihat grafik berbentuk lonceng yang hampir sempurna (simetris).

Uji normalitas Kolmogorov Smirnov (K-S) merupakan bagian dari uji asumsi klasik menggunakan teknik statistik. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho : Data residual tidak berdistribusi normal

Ha : Data residual berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

Ho diterima jika nilai signifikansi (Asymp.Sig) < 0,05 yang artinya adalah nilai residual tidak berdistribusi normal.

Ha diterima jika nilai signifikansi (Asymp.Sig) > 0,05 yang artinya adalah nilai residual berdistribusi normal.

---

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

---

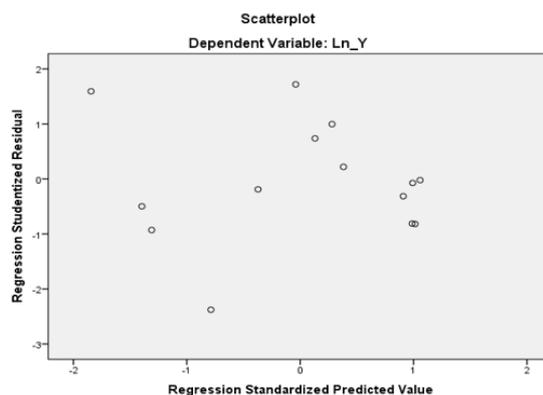
N		14
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.19990982
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.151
	Negative	-.105
Test Statistic		.151
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Dari hasil uji statistik pada Table 7 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,151 dengan signifikansi pada 0,200 yakni nilainya diatas  $\alpha = 0,05$  (Asymp. Sig = 0,200 > 0,05) sehingga hipotesis  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat apakah model regresi tidak terjadi heterokedastisitas dapat menggunakan dua cara yaitu analisis grafik dengan scatterplots dan analisis statistik dengan uji glejser. Tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.<sup>20</sup>



Gambar 9. Grafik Scatterplot  
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Dari grafik scatterplots pada Gambar 13 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Heterokedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak efisien dan

<sup>20</sup> Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

akurat. Cara lain yang lebih akurat untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan Uji Glejser. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi

(Sig) antara variable bebas dengan absolut residualnya lebih besar dari ( $>$ ) 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Glejser

Model	Standardized Coefficients		t.	Sig.
	Std. Error	Beta		
(Constant)	.777		.000	1.000
1 Ln_X1	.112	.000	.000	1.000
Ln_X2	.097	.000	.000	1.000
Ln_X3	.217	.000	.000	1.000
Ln_X4	.644	.000	.000	1.000
Ln_X5	.140	.000	.000	1.000

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Hasil dari analisis statistik uji glejser menunjukkan koefisien parameter untuk variable bebas yaitu :

Ln\_X1 ( Variabel Investasi ) =

$$1,00 > \alpha = 0,05$$

Ln\_X2 ( Variabel Tenaga Kerja ) =

$$1,00 > \alpha = 0,05$$

Ln\_X3 ( Variabel PAD ) =  $1,00 > \alpha =$

$$0,05$$

Ln\_X4 ( Variable DAU ) =  $1,00 > \alpha =$

Ln\_X5 ( Variable DAK ) =  $1,00 > \alpha =$

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.094	.777			-.121	.907		
Ln_X1	.264	.112	.292		2.353	.046	.714	1.400
Ln_X2	.293	.097	.450		3.030	.016	.497	2.010
Ln_X3	.564	.217	.585		2.594	.032	.216	4.623
Ln_X4	.225	.644	.113		.349	.736	.105	9.565

Ln_X5	-.258	.140	-.382	-1.835	.104	.254	3.936
-------	-------	------	-------	--------	------	------	-------

**a. Dependent Variable: Ln\_Y**

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Pada Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Jika terjadi korelasi, maka terdapat adanya masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variable bebasnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 24 didapatkan hasil analisis Pada gambar 15 yaitu :

Ln\_X1 (Investasi) = Tolerance 0,714 > 0,100 dan VIF 1,401 < 10,00

Ln\_X2 (Tenaga Kerja) = Tolerance 0,497 > 0,100 dan VIF 2,011 < 10,00

Ln\_X3 (PAD) = Tolerance 0,216 > 0,100 dan VIF 4,625 < 10,00

Ln\_X4 (DAU) = Tolerance 0,105 > 0,100 dan VIF 9,560 < 10,00

Ln\_X5 (DAK) = Tolerance 0,254 > 0,100 dan VIF 3,936 < 10,00

Dari hasil analisis diatas yang diambil berdasarkan nilai Tolerance dan VIF dari masing-masing variable bebas dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan nilai Tolerance dari setiap variable lebih dari 0,100 dan nilai VIF dari seluruh variable bebas lebih kecil dari 10,00 yang artinya bahwa variable bebas pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas sehingga model tersebut memenuhi syarat asumsi klasik dalam analisis regresi.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model yang digunakan dilakukan pengujian Durbin Watson. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah tidak ada gejala autokorelasi jika nilai dari Durbin Watson terletak diantara du sampai dengan (4-du).<sup>22</sup>

**Tabel 9.** Hasil Uji Autokorelasi

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>	<b>Durbin-Watson</b>
1	.955 <sup>a</sup>	.912	.857	.25484	2.263

a. Predictors: (Constant), Ln\_X5, Ln\_X1, Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X4  
b. Dependent Variable: Ln\_Y

<sup>21</sup> Iman Taufik. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kota Tebing Tinggi. Tesis Magister (Perencanaan Wilayah dan Perdesaan) Universitas Sumatera Utara.

<sup>22</sup>Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistic Durbin Watson (dw) sebesar 2,263. Nilai du dicari pada distribusi nilai table Durbin Watson berdasarkan k (5) dan N (14) dengan signifikansi 5%. Selanjutnya nilai akan dimasukkan pada rumus  $du (2,2954) > dw (2,263) > 4-du (1,7046)$ . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negative dan nilai dw berada diantara nilai du dan (4-du) dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

### **Pembahasan**

Indonesia sebagai Welfare State atau negara kesejahteraan yaitu negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial dari ekonomi rakyat. Hal ini tertuang dalam dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kehadiran negara pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi rakyat dan

keamanan nasional hal ini sejalan dengan pernyataan Adam Smith (1970) yaitu tugas untuk melindungi masyarakat perlu dilakukan oleh negara melalui kekuatan pertahanan sebagai kewajiban pertama.

Kekuatan pertahanan sebuah negara identik dengan kedaulatan negara tersebut, kedaulatan dapat terjaga apabila terciptanya kondisi keamanan nasional dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tercapainya pertumbuhan jika jumlah fisik barang-barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian bertambah besar dari tahun sebelumnya. Untuk dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dibutuhkan data ekonomi yang merupakan sumber dari informasi sistematis. Keakuratan gambaran dari kondisi perekonomian membutuhkan data yang akurat. Oleh para ahli, statistik ini digunakan untuk mempelajari perekonomian dalam mengambil keputusan dalam mengawasi pembangunan suatu daerah dan dan perekonomian daerah tersebut serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran.

### **Pengaruh Investasi Terhadap PDRB Kabupaten Asahan**

Hasil penelitian menunjukkan investasi berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Jumlah investasi di Kabupaten Asahan yang memiliki tanda positif mengartikan bahwa terdapat hubungan searah menaik yang artinya setiap penambahan 1% jumlah investasi Kabupaten Asahan akan meningkatkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,264% atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Jumlah investasi berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Hasil ini menunjukkan selama periode penelitian yaitu tahun 2005-2018 perkembangan jumlah investasi mampu untuk mempengaruhi PDRB Kabupaten Asahan secara signifikan, hal ini disebabkan kontribusi investasi di Kabupaten Asahan yang sudah cukup baik serta pengelolaan potensi yang sudah maksimal. Hasil yang didapat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Neo Klasik dan Teori Harrod-Domar.

### **Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten Asahan**

Hasil penelitian menunjukkan Tenaga Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Asahan yang memiliki tanda positif mengartikan bahwa terdapat hubungan searah menaik yang artinya setiap penambahan 1% jumlah tenaga kerja Kabupaten Asahan akan mempengaruhi peningkatan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,293%. Jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sollow Swan dan Teori Klasik Adam Smith

Hasil dari penelitian ini menunjukkan selama periode penelitian yaitu tahun 2005-2018 perkembangan jumlah tenaga kerja mampu untuk mempengaruhi PDRB Kabupaten Asahan secara signifikan, hal ini disebabkan jumlah pendapatan yang diterima para pekerja sudah cukup tinggi sesuai dengan jumlah kebutuhan yang dikeluarkan dilihat dari nominal UMK (Upah Minimum) Kabupaten Asahan pada tahun 2019 yaitu Rp 2.814,734 termasuk dalam 10 besar UMK tertinggi dari seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Dengan tingginya pendapatan di Kabupaten Asahan, akan mempengaruhi

banyaknya masyarakat yang membelanjakan hasil pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Dengan begitu akan mendokrak angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan.

Salah satu alasan lain yang menyebabkan tenaga kerja mempengaruhi PDRB adalah beberapa tahun belakang, sudah banyak bermunculan usaha seperti hiburan (karaoke) serta restoran dan usaha mikro kecil sebagai lapangan kerja baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja

Kebijakan yang dilakukan oleh DINas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan juga sudah maksimal dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat Asahan dalam pencari kerja, Disnaker sebagai perantara yang menghubungkan antara perusahaan pencari tenaga kerja dengan masyarakat pencari pekerjaan dengan mensosialisasikan infokerja sebagai info lowongan yang dapat di akses di [www.infokerja.kemnaker.go.id](http://www.infokerja.kemnaker.go.id).

Masyarakat yang butuh pekerjaan juga dapat mendaftar di Disnaker untuk info seputar lowongan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara, Disnaker Asahan sering menjembatani tenaga kerja dari Asahan untuk bekerja di perusahaan swasta di daerah Batam.

Untuk mendukung kesejahteraan pekerja di Kabupaten Asahan, Disnaker juga menjadikan instansinya sebagai mediator antara buruh dengan perusahaan jika terjadi kesalahpahaman.

### **Pengaruh PAD Terhadap PDRB Kabupaten Asahan**

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah PAD Kabupaten Asahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Jumlah PAD Kabupaten Asahan yang memiliki tanda positif memiliki arti bahwa hubungan searah menaik yaitu setiap penambahan 1% jumlah PAD Kabupaten Asahan akan meningkatkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,564%. Hasil penelitian juga menyatakan jumlah PAD Kabupaten Asahan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan yang mengindikasikan bahwa PAD Kabupaten Asahan merupakan salah satu faktor penting dalam membantu meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Dari hasil tersebut menandakan bahwa Kabupaten Asahan dapat membangun daerahnya secara mandiri dengan menjadikan PAD sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan pembangunan tanpa ketergantungan dari bantuan Pemerintah Pusat.

### **Pengaruh DAU Terhadap PDRB Kabupaten Asahan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Jumlah DAU di Kabupaten Asahan yang memiliki tanda positif mengartikan bahwa terdapat hubungan searah menaik yang artinya setiap penambahan 1% jumlah investasi Kabupaten Asahan akan meningkatkan PDRB Kabupaten Asahan sebesar 0,225% atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan. Dana Alokasi Umum diserahkan langsung oleh pusat ke daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah yang bersifat Block Grant dalam rangka otonomi daerah. Berdasarkan dengan rumus perhitungan Dana Alokasi Umum yang diambil dari Alokasi Dasar dalam hal ini adalah Gaji PNS dan Celah Fiskal, bantuan untuk kemampuan keuangan daerah dalam desentralisasi seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya sejalan dengan pembangunan suatu daerah. Namun dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukan jumlah DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Hasil ini menunjukkan selama periode

penelitian yaitu tahun 2005-2018 jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat tidak mampu untuk mempengaruhi PDRB Kabupaten Asahan secara signifikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bagian Akuntansi dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan, jumlah penerimaan dan distribusi DAU ke Pemerintah Daerah tidak ada kendala, namun memang pemanfaatan DAU di Asahan untuk pembangunan tidak terlalu signifikan karena Asahan memiliki angka PAD yang tinggi yang mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi selain dari Investasi.

### **Pengaruh DAK Terhadap PDRB Kabupaten Asahan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Jumlah DAK Kabupaten Asahan yang memiliki tanda negatif mengartikan bahwa tidak terdapat hubungan searah menaik yang artinya setiap penambahan 1% jumlah DAK yang diterima dari Pemerintah Pusat tidak mampu meningkatkan PDRB Kabupaten Asahan. Hasil penelitian juga di dapatkan bahwa jumlah DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 DAK adalah suatu dana yang berasal dari pemerintah pusat kemudian di transfer ke daerah untuk mendanai kegiatan khusus daerah berdasarkan dengan skala prioritas nasional dengan penentuan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis yang bertujuan untuk membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan biaya kegiatan daerah dan pelayanan masyarakat serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah untuk tercapainya prioritas nasional. Dengan begitu semakin banyak DAK yang diterima daerah pusat akan mendorong pembangunan daerah yang seharusnya mampu menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan selama periode penelitian yaitu tahun 2005-2018 jumlah DAK yang diterima dari Pemerintah Pusat tidak mampu untuk mempengaruhi PDRB Kabupaten Asahan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan pembangunan Kabupaten Asahan dapat dimanfaatkan menggunakan Pendapatan Daerahnya sendiri. Sedangkan dana dari Pemerintah Pusat digunakan pada kebutuhan khusus yang dampaknya tidak berpengaruh langsung pada

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan.

### **Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten Asahan**

Hasil penelitian menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel Investasi, Tenaga Kerja, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai F hitung dengan F table dimana F hitung sebesar 16,610 yaitu lebih besar dari pada nilai F tabelnya yaitu 3,48 dengan derajat kepercayaan sebesar 95%. Sinergitas dari kelima variabel yang diteliti tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap nilai PDRB Kabupaten Asahan. Dan berdasarkan uji Koefisien Determinasi pengaruh yang diberikan kelima variabel yang diteliti terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Asahan adalah sebesar 91,2%.

Beberapa cara dapat dilakukan untuk dapat merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu salah satunya adalah dengan memaksimalkan potensi alam yang ada di daerah Kabupaten Asahan dengan mengefektifkan pengelolaan dan pembangunan wisata daerah, menambah geliat sektor investasi baru seperti properti, penambahan komoditas perkebunan dan kembali memperhatikan

populasi wallet di daerah Asahan. Menarik banyak minat para investor asing dengan memamerkan banyak keunggulan yang dimiliki Kabupaten Asahan dengan optimis. Investasi baru akan menambah stok modal yang pada akhirnya akan membantu penambahan output daerah. Pembentukan modal baru dalam investasi dapat memperbesar kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Asahan.

Tidak hanya itu, peningkatan angka Pendapatan Asli Daerah dapat juga membantu memberikan rangsangan terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan adalah modal utama daerah tersebut untuk melaksanakan pembangunan daerah. Penggalan potensi daerah dan menyadarkan para wajib Pajak untuk membayar pajak dan retribusi untuk dapat meningkatkan nilai PAD secara maksimal akan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan daerah secara mandiri tanpa ketergantungan dari Pemerintah Pusat dan dengan adanya pembangunan daerah akan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan pula partisipasi dari masyarakat dalam bentuk tenaga kerja. Dengan memiliki tenaga kerja yang potensial dan berkualitas akan dapat membantu melaksanakan pembangunan daerah dengan begitu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Asahan dapat lebih cepat tercapai.

Bantuan dari Pemerintah Pusat dapat juga dimaksimalkan penggunaannya dengan tepat sasaran untuk membantu menutupi kebutuhan daerah yang kurang dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dengan terlaksananya pembangunan daerah akan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Dengan begitu akan tercipta kesejahteraan masyarakatnya dan keamanan nasional sejalan dengan tujuan dari ekonomi pertahanan.

### **Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan**

Investasi berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Dengan nilai  $t$  hitung (2,353) >  $t$  table (2,30600), tingkat probabilitas  $P$  (0,046) <  $\alpha$  (0,05) dan dengan nilai koefisien sebesar 0,264. Hal ini berarti kontribusi investasi Kabupaten Asahan sudah cukup baik karena dapat

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan, namun harus perlu adanya peningkatan untuk lebih memanfaatkan dan mengelola potensi-potensi baru yang dimiliki Asahan baik alam maupun buatan yang masih belum di maksimalkan.

Tenaga Kerja berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Dengan nilai t hitung (3,030) > t table (2,30600), tingkat probabilitas P (0,016) <  $\alpha$  (0,05) dan dengan nilai koefisien sebesar 0,293 Hal ini menandakan bahwa jumlah tenaga kerja Kabupaten Asahan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Dengan nilai t hitung (2,594) > t table (2,30600), nilai probabilitas P (0,032) <  $\alpha$  (0,05) dan dengan nilai koefisien sebesar 0,564. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah Asahan dan hal ini menandakan bahwa Kabupaten Asahan sudah cukup mandiri dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan.

Dengan nilai t hitung (0,349) < t table (2,30600), dan tingkat probabilitas P (0,736) >  $\alpha$  (0,05) serta nilai koefisien sebesar 0,225. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya sudah tidak ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Dengan nilai t hitung (1,835) < t table (2,30600), dan tingkat probabilitas P (0,104) >  $\alpha$  (0,05) serta nilai koefisien sebesar 0,258. Hal ini berarti Asahan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya sudah tidak ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat

Investasi, Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan memberikan pengaruh terhadap PDRB Kabupaten Asahan. Kelima Faktor tersebut mampu memberikan kontribusi besar terhadap nilai PDRB Kabupaten Asahan.

Rekomendasi pada penelitian ini adalah:

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan perlu lebih menggali potensi alam yang ada di Asahan seperti pada sektor

pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan kembali produksi hasil karet alam, memaksimalkan hasil dari produksi pohon kelapa, serta ubi kayu. Pada sektor perternakan, pemeliharaan burung wallet dan lainnya serta memaksimalkan pengelolaan wisata alam, memperbaiki infrastruktur serta akses menuju lokasi wisata alam yang dimiliki. Tidak hanya itu Pemerintah Daerah juga perlu lebih menginformasikan mengenai Profil dan Potensi Kabupaten Asahan dengan memanfaatkan sistem informasi dan media informasi yang efektif dan bergaya millennial untuk dapat menarik perhatian para investor. Mempermudah proses perizinan para investor dengan optimalisasi pelayanan satu atap, guna meningkatkan investasi, menumbuhkan investasi baru dengan potensi baru dan mendukung investasi yang telah ada sebelumnya bertujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Serta dalam proses perizinan para investor tetap memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility) agar dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan daerah Asahan juga mendapatkan dari keuntungan yang diperoleh.

Salah satu sumber daya lokal yang terpenting adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimiliki perlu ditingkatkan kualitas, kompetensinya dan memiliki integritas. Kondisi tersebut dianggap penting dihadapkan pada kondisi global yang semakin bersaing dengan ketat. Pelatihan-pelatihan yang disediakan perlu ditambahkan mengenai teknologi dan sistem informasi yang saat ini Indonesia sedang alami yaitu revolusi 4.0. Pelatihan dengan gaya dan model baru serta up to date akan lebih memberikan daya tarik para tenaga kerja untuk mengikutinya. Membantu pemerintah pusat dalam mensosialisasikan UMKM Go Online di daerah Kabupaten Asahan agar para penduduk usia produktif tidak hanya mencari kerja, namun juga membuka lapangan kerja didaerahnya sendiri. Menyediakan formasi kepada putra dan putri daerah serta memanggil putra putri daerah berprestasi yang ada di luar kota untuk membangun daerah Asahan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengimbau masyarakat dan yang terpenting para pengusaha yang memiliki usaha di daerah Asahan sebagai Wajib Pajak untuk taat dalam membayar Pajak dan Retribusi.

Menggali sumber kekayaan alam yang ada dan pendapatan asli daerah yang dipisahkan untuk di optimalisasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keamanan nasional.

Pemerintah Kabupaten Asahan dianggap perlu untuk memaksimalkan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kebutuhan yang diutamakan dan yang dibutuhkan. Mengawasi jalur pengalokasian dana tersebut saat proses pelaksanaannya. Hal tersebut dirasa perlu untuk membantu mempercepat peningkatan kinerja perekonomian daerah Kabupaten Asahan.

Dirasa sangat diperlukan untuk mengkaji kembali penelitian ini atas masalah yang sama atau dengan menggunakan variabel lainnya dan atau mengangkat masalah yang berkaitan dengan personil pertahanan (Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung) yang ada di Kabupaten Asahan dengan menggunakan konsep dan metode pendekatan yang sama atau berbeda agar dapat dilakukan studi komparasi serta dapat mendukung temuan-temuan baru yang ada. Pembangunan manufaktur juga perlu ditingkatkan untuk menambah

jumlah lapangan kerja yang dapat menarik tenaga kerja.

Untuk mendukung penelitian selanjutnya dibutuhkan sumber informasi yang lengkap oleh sebab itu dirasa perlu bagi instansi pemerintahan di Kabupaten Asahan untuk lebih meningkatkan isi dan informasi update serta mudah dalam akses informasi pada website resmi masing-masing dan mencantumkan kontak person resmi serta informasi terbaru.

Batasan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah sehingga maksud dan tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini hanya terbatas dengan penggunaan lima variabel bebas yaitu Investasi, Tenaga kerja, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Informasi yang disajikan adalah mengenai deskripsi Kabupaten Asahan, Pertumbuhan Ekonomi daerah tersebut dan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diambil. Variabel bebas lain yang belum diteliti dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi variabel penelitian pada penelitian selanjutnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multifariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Sanusi, Anwar. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. (2007). *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. (2003). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta : UPPAMP YKPN.
- Supandi. (2009). *Text Book Ekonomi Pertahanan*. Jakarta Makmur Cahaya Ilmu, Jakarta.
- Supandi. (2014). *Text Book Ekonomi Pertahanan*. Jakarta Makmur Cahaya Ilmu, Jakarta.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2010). *Perekonomian Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan*. PT. Gramedia, Jakarta

### Jurnal

- Darmono, Bambang. (2010). "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia". *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 15 No.1
- Rarung, Patric. (2016). "Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 Nomor 03 Tahun

### Tesis

- Taufik, Iman. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kota Tebing Tinggi*. Tesis Magister (Perencanaan Wilayah dan Perdesaan) Universitas Sumatera Utara.

### Dokumen

- Badan Pusat Statistik, 2012, *Produk Domestik Regional Bruto*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan.
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Tebing Tinggi Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan.
- Bappeda Kabupaten Asahan. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan 2016-2021*.
- Profil Potensi Dan Peluang Investasi Daerah Kabupaten Asahan 2019
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Website

- Dana Alokasi Umum. Diakses pada <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>
- Website Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776> diakses pada 9 Agustus 2019